

**Dilema Aliansi Keamanan
Korea Selatan-Amerika
Serikat: Studi kasus
penempatan THAAD di
Korea Selatan**

Frequency of International Relations
September, Vol 3 (2) 71-102
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : April 13, 2022
Accepted : April 25, 2022
Available On-line : May 16, 2022

Nadya Elvira

Hubungan Internasional, Universitas Andalas
nadiaelfira98@gmail.com

Abstract

The research conducted as following below purposed to provide the explanation behind South Korea's rational decision in conducting the Three No's Policy agreement with Tiongkok as an effort to achieve normalization of relations between the two countries after the boycott of the entry of South Korean products into China because of China's rejection of the cooperation of the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) between South Korea and the United States. This research is analyzed using a conceptual framework called Rational Actor Model. Based on Graham T. Allison, Rational Actor Model is divided into four main indicators that is being considered during taking a decision, which are Goals and Objectives, Alternatives, Consequences, and Choice. This research analyze South Korea's rational reasons for approving the policy through a literature study using the four elements described by Allison above. According to the Rational Actor Model itself, this research found that the economic factor is the main reason why South Korea finally decided to take the Three No's Policy agreement moreover considering the entire boycott towards South Korea's products that is being done by Tiongkok beforehand. This research found that South Korea's reason for agreeing to Three No's Policy regarding the issue of a boycott by China against South Korea was due to economic factors. Although also confronted with alternatives regarding security policies, maintaining relations with China is more rational for South Korea because of the large economic interests of South Korea towards China. That is because China is the main trading partner and the biggest market for South Korea.

Keywords: United States, South Korea, THAAD, Three No's Policy, China

Pendahuluan

Terminal High Altitude Area Defense atau yang biasa dikenal dengan singkatan THAAD merupakan sistem pertahanan canggih yang dikembangkan oleh perusahaan Lockheed Martin milik Amerika Serikat. Tujuan diproduksinya THAAD oleh Amerika Serikat yaitu untuk mengeluarkan rudal balistik yang mengancam atau dikenal dengan fase “terminal”. THAAD bekerja dengan menggunakan energi kinetik (hit to kill technology) di mana sistem ini akan menembakkan misil yang datang dan meledakkannya di udara. Jangkauan dari sistem THAAD sendiri mencapai jarak sejauh 200 km dan ketinggian hingga 150 km dan dapat mengidentifikasi ancaman rudal dari jarak sejauh 1.000 km. Meskipun THAAD merupakan sistem pertahanan milik Amerika Serikat, namun pengembangannya terdapat di beberapa negara, salah satunya di Korea Selatan. Hal tersebut diawali dari dilaksanakannya diskusi resmi yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan pada bulan Februari 2016 mengenai penempatan THAAD di Korea Selatan. Akhirnya pada tanggal 7 Juli 2016, Korea Selatan setuju untuk mendukung kebijakan misil Amerika Serikat dengan ditandatanganinya persetujuan kerja sama THAAD (Judson, 2016).

Keputusan Korea Selatan tersebut didukung karena meningkatnya ancaman nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada uji coba nuklirnya yang ke empat pada bulan Januari 2016, sehingga

menimbulkan kecemasan bagi Korea Selatan sebagai negara yang mengalami perselisihan dengan Korea Utara. Perilaku Korea Utara untuk terus melanjutkan program senjata nuklirnya sebagai wujud perasaan tidak amannya di kawasan (Permata, 2019). Keputusan kerja sama THAAD antara Amerika Serikat dan Korea Selatan ditentang oleh Tiongkok yang merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur dan merupakan mitra kerja sama penting bagi Korea Selatan.

Tiongkok melakukan penentangan secara resmi yang diumumkan melalui konferensi pers oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Tiongkok menyatakan bahwa penempatan THAAD di Korea Selatan akan mengancam kepentingan keamanan nasional Tiongkok dan mengganggu keseimbangan keamanan regionalnya (Defense Ministry's regular press conference, 2016). Tiongkok kemudian juga mengambil langkah dengan melakukan pemboikotan terhadap masuknya produk Korea Selatan ke Tiongkok. Pada bulan November 2016, Tiongkok mengeluarkan peraturan bagi para stasiun televisi Tiongkok melalui State Administration of Press and Publication, Radio, Film, and Television (SAPPRFT) untuk tidak menayangkan produk yang berkaitan dengan Korea Selatan (Kim, 2010). Namun, pada akhirnya normalisasi hubungan di antara Korea Selatan dan Tiongkok dapat tercapai pada tanggal 30 Oktober 2017 yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha. Kemudian,

pengumuman normalisasi hubungan dengan Korea Selatan juga disampaikan oleh Kementrian Luar Negeri Tiongkok pada tanggal 31 Oktober 2017. Normalisasi diantara Korea Selatan dan Tiongkok ditandai dengan adanya Three Nos Policy. Terdapat tiga poin dalam Three Nos Policy yaitu mengenai tidak ada pemasangan THAAD tambahan, Korea Selatan dilarang berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil Amerika Serikat dan tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan Jepang (Byong-Su, 2019). Maka dari itu, penting untuk dikaji keputusan Korea Selatan menyetujui Three No's Policy dengan Tiongkok.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data yang ada merupakan data yang dihimpun dari literatur dan tulisan ilmiah yang dijadikan sebagai sumber utama dalam melihat permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa penelitian dan literatur-literatur terdahulu. Data sekunder ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, di mana teknik ini adalah teknik pengumpulan data yang membatasi pengambilan data pada koleksi pustaka atau pada literatur maupun dokumen tertulis yang sudah ada, dan tidak menggunakan data lapangan. Data-data di dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar,

berita, website resmi, maupun dokumen-dokumen resmi. Artikel Jurnal utama yang penulis jadikan sumber adalah tulisan dari Jaganath Sankaran dan Bryan L. Fearey yang berjudul Missile defense and strategic stability: Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in South Korea. Peneliti juga mengambil sumber dari website resmi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Selain itu data-data dalam penelitian ini juga diambil melalui website berita seperti BBC News, CNN News dan Newyork Times. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebagai sumber dalam melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah pilihan rasional Korea Selatan. Korea Selatan menjadi unit analisis karena yang akan penulis kaji dalam tulisan ini adalah pilihan rasional Korea Selatan menyetujui Three Nos Policy dengan Tiongkok pasca penempatan THAAD di Korea Selatan. Sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah tindakan pemboikotan yang dilakukan oleh Tiongkok dan hubungan aliansi dengan Amerika Serikat. Disamping itu yang menjadi tingkat analisa dalam penelitian kali ini adalah sistem internasional.

Hasil

Dalam penelitian ini peneliti menemukan alasan terhadap pilihan rasional Korea Selatan dalam menyetujui Three Nos policy,

yakni berkaitan dengan kepentingan ekonominya. Berdasarkan kalkulasi untung dan rugi dapat dilihat bahwa kebijakan ekonomi dengan Tiongkok merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan lebih besar untuk Korea Selatan. Selain itu Korea Selatan akan mendapatkan kerugian yang cukup besar apabila memilih kebijakan keamanan dengan Amerika Serikat. Sehingga dapat dilihat bahwa opsi yang dipilih Korea Selatan yaitu kebijakan ekonomi dengan Tiongkok dengan disetujuinya Three Nos Policy sebagai sebuah upaya untuk normalisasi hubungan diantara kedua negara.

Diskusi dan Analisis

Untuk mengidentifikasi opsi yang diambil oleh Korea Selatan, peneliti menggunakan kerangka konseptual Rational Actor Moder yang dikemukakan oleh Graham T. Allison. Dalam menentukan opsi terdapat beberapa indikator yaitu *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences*, dan *Choice*.

Tujuan Negara Korea Selatan (Goals and Objectives)

Goals and Objectives merupakan indikator pertama dalam langkah pengambilan keputusan. Hal ini mengacu pada minat dan nilai-nilai aktor yang diterjemahkan kedalam hasil atau utilitas atau fungsi prefensi, yang mewakili keinginan atau utilitas serangkaian konsekuensi yang saling terkait dalam hal nilai dan tujuan. Dalam menentukan pilihan rasional, negara digambarkan sebagai aktor

individu yang memiliki pengetahuan terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in, Korea Selatan memiliki beberapa kebijakan Luar Negeri yang berkaitan dengan kepentingan nasional negaranya, berdasarkan dengan situasi di semenanjung Korea dan permasalahan ekonomi yang sedang dialami Korea Selatan menurut analisis peneliti terdapat dua tujuan yang ingin dicapai Korea Selatan.

1. Kepentingan Keamanan

Sebagai negara yang terlibat perselisihan dengan Korea Utara, Korea Selatan telah beberapa kali mengalami ancaman keamanan yang disebabkan oleh adanya uji coba nuklir Korea Utara. Pada tanggal 6 Januari 2016, Korea Utara telah melakukan uji coba nuklirnya yang ke empat, terhitung dari tahun 2006, dengan meledakkan bom hidrogen yang merupakan senjata yang lebih kuat dari bom atom. Uji coba tersebut telah menyebabkan terjadinya gempa dengan kekuatan 5,1 skala richter. Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara tersebut dianggap Korea Selatan sebagai provokasi yang sangat serius. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Park Geun-hye yang merupakan Presiden Korea Selatan pada masa itu, “The test is not only a grave provocation to our national security but also a threat to our future and a strong challenge to international peace and stability” (AFP, Nd).

Selain itu, salah seorang pejabat keamanan Korea Selatan, Cho Tae-yong juga menyampaikan peringatannya terhadap uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut “Our military is at a state of full readiness, and if North Korea wages provocation, there will be firm punishment”.

Kemudian, Menurut pernyataan dari seorang pejabat militer Korea Selatan pada tanggal 7 Januari 2016, bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang dalam pembicaraan untuk mengerahkan senjata strategis Amerika Serikat di Korea Selatan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa provokasi secara terus menerus yang dilakukan Korea Utara telah mendorong Korea Selatan untuk meningkatkan pertahanan negaranya dengan melakukan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat dengan memasang sistem pertahanan THAAD di Korea Selatan.

Dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam bidang keamanan, memperkuat aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat telah menjadi kebijakan luar negeri Korea Selatan sejak masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye. Di mana pada tahun 2015, Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin memperdalam dan mengembangkan aliansi strategis komprehensif Korea Selatan-Amerika Serikat dengan nilai-nilai bersama dan rasa saling percaya sebagai dasar yang kuat terhadap hubungan kedua negara. Korea

Selatan dan Amerika juga mencapai kemajuan substansial dalam aliansi bilateral, serta dalam masalah yang berkaitan dengan Semenanjung Korea, Asia Timur Laut dan kemitraan global. Penguatan aliansi juga diperkuat dengan menandatangani “Perjanjian Republik Korea-Amerika Serikat untuk Kerja Sama Mengenai Penggunaan Energi Nuklir yang Damai”. Selain itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat berkontribusi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan di Asia Timur Laut dengan secara tegas melawan berbagai provokasi Korea Utara seperti ledakan ranjau darat dan peluncuran artileri.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yun Byung-se, “Our government has been leading the international community's foreign policies toward North Korea to create a structure of the entire international community vs. North Korea, and implementing firm and strong measures such as shutting down the Kaesong Industrial Complex and the US deployment of THAAD in order to secure the very survival of our own country and people against North Korean nuclear threats and missile provocations” (Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic White Paper 2016).

Pada masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in, memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat masih menjadi Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Amerika Serikat. Di mana pada kunjungan

kenegaraan Presiden Moon Jae-in ke Amerika Serikat pada bulan Juni 2017, kedua negara menyatakan untuk memajukan aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat menjadi aliansi yang lebih besar dan juga menyepakati kerja sama lebih lanjut tentang keamanan dan pertahanan nasional, ekonomi, dan isu-isu global.

Dalam sebuah wawancara dengan Washington Post pada tanggal 22 Juni 2017, Moon Jae-in menyatakan bahwa ia percaya akan pentingnya aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan dan menyampaikan bahwa Korea Selatan harus memimpin upaya yang lebih besar dibandingkan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea “Korea should now play a larger and more leading role in this process, during the periods when South Korea played a more active role, the inter-Korean relationship was more peaceful and there was less tension between the United States and North Korea.” (Berlinger, 2017)

Dengan berbagai ancaman nuklir yang sering dilakukan oleh Korea Utara, menjadikan Korea Selatan menyatakan bahwa resolusi krisis keamanan dan pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, penting bagi Korea Selatan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya dengan memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat sebagai bentuk kepentingan keamanan nasionalnya. Selain itu,

kebijakan memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat termasuk ke dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan mengenai mengamankan momentum untuk perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea melalui pemulihan diplomasi puncak.

2. Kepentingan Ekonomi

Adanya kerja sama diantara Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan pemasangan sistem THAAD di Korea Selatan sebagai bentuk pertahanan dari adanya ancaman nuklir Korea Utara, telah menyebabkan terjadinya penurunan hubungan diantara Korea Selatan dengan Tiongkok. Di mana Tiongkok melakukan pemboikotan terhadap masuknya produk-produk Korea Selatan ke Tiongkok, padahal sebelumnya Korea Selatan dan Tiongkok dapat dikatakan memiliki hubungan ekonomi yang cukup baik. Di mana sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1992, hubungan diantara Korea Selatan dan Tiongkok terus berkembang kearah yang lebih maju.

Pada tahun 2015, Korea Selatan dan Tiongkok melakukan upaya besar untuk meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara, di mana kedua negara berhasil dalam memperkuat kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan budaya. Pada masa pemerintahan presiden Park Geun-hye, Korea Selatan dan Tiongkok telah berhasil melanjutkan diskusi tentang pengoptimalan Free Trade Area Korea

Selatan-Tiongkok serta untuk memperkuat kerja sama pada bisnis bernilai tambah tinggi, termasuk bisnis budaya dan keuangan, dan kerja sama ekonomi berorientasi masa depan.

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Korea Selatan dan Tiongkok memiliki volume perdagangan yang mencapai US \$227,4 miliar dengan Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Korea Selatan dalam kegiatan impor dan ekspor. Korea Selatan juga menjadi mitra terbesar Tiongkok dalam ekspor dan mitra ketiga terbesar dalam kegiatan impor. Selain itu, Free Trade Area diantara Korea Selatan dan Tiongkok mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2015, sehingga memperkuat kerangka kelembagaan untuk hubungan ekonomi yang komprehensif diantara kedua negara. Pada tahun 2014, jumlah pengunjung antara Korea Selatan dan Tiongkok melebihi 10 juta pengunjung, peningkatan tersebut terbilang sangat besar dari hanya 130.000 pengunjung ketika kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 2015, masyarakat Tiongkok yang mengunjungi Korea Selatan mencapai hingga 10,4 juta pengunjung, jumlah penerbangan komersial mingguan antara kedua negara juga sangat besar mencapai 1.100 penerbangan. (Ministry of Foreign Affairs, 2016:88-89).

Tiongkok juga merupakan negara dengan investasi yang besar ke Korea Selatan. Pesatnya perkembangan Korean Wave di dunia, dan

tingginya minat masyarakat Tiongkok terhadap Korean Wave telah menarik Tiongkok dalam berinvestasi dalam dunia hiburan Korea Selatan. Tiongkok telah berinvestasi dengan jumlah yang cukup besar yaitu US\$161,3 juta (183 miliar won). Pada tahun 2014, investasi Tiongkok di Korea Selatan mengalami kenaikan menjadi US\$631 juta dari US\$133 juta pada tahun 2013.

Sebagai negara dengan ekonomi ekspor terbesar ke lima di dunia menurut Economic Complexity Index, Korea Selatan tentu sangat mengandalkan kegiatan ekspor negaranya. Dalam hal ini Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor utama bagi Korea Selatan. Pada tahun 2016, dari hampir \$500 miliar barang yang di ekspor Korea Selatan, seperempat dari kegiatan ekspor Korea Selatan tersebut yaitu sebesar \$125 miliar dikirim ke Tiongkok (Ferrier, 2020).

Selain itu, berdasarkan Kebijakan Luar Negeri pada masa pemerintahan Moon Jae-in, Korea Selatan membentuk kebijakan luar negeri terhadap Tiongkok untuk memperkuat komunikasi dan meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara. Presiden Moon Jae-in juga telah melakukan sejumlah langkah untuk meredakan kecemasan Tiongkok terhadap sistem THAAD yang dipasang di Korea Selatan. Melalui Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha ia menyampaikan bahwa Korea Selatan tidak akan melakukan penyebaran sistem lagi. Selain itu dapat dilihat dalam panggilan

telepon yang dilakukan Presiden Moon Jae-in kepada Presiden Xi Jinping, Moon Jae-in mengatakan, “I am well aware of the concern and fear of the Chinese about the Thaad deployment, I hope both countries can understand each other better on this and will soon open a channel of communication” Dalam panggilan telepon tersebut dapat dilihat bahwa Presiden Moon Jae-in memiliki harapan untuk dapat membicarakan permasalahan THAAD dengan Tiongkok.

Dengan besarnya kepentingan ekonomi Korea Selatan terhadap Tiongkok, maka penting bagi Korea Selatan untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Selain itu memperkuat diplomasi ekonomi telah menjadi kebijakan luar negeri Korea Selatan dan menjadi salah satu dari lima kebijakan Moon Jae-in dalam administrasi pemerintahannya yaitu perekonomian untuk kemakmuran bersama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dapat dilihat bahwa kepentingan ekonomi menjadi sesuatu yang sangat diperlukan bagi Korea Selatan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut Korea Selatan tentu harus mampu menjaga hubungan perdagangan dengan Tiongkok.

Sehingga pada bagian ini dapat dilihat bahwa kepentingan keamanan dan kepentingan ekonomi menjadi hal yang sangat diperlukan oleh Korea Selatan mengingat situasi yang sedang dihadapi oleh negaranya, yaitu dengan adanya ancaman nuklir Korea

Utara dan adanya penurunan hubungan dengan Tiongkok yang merupakan mitra kerja sama utama Korea Selatan dalam bidang ekonomi.

Alternatif yang dapat dipilih oleh Korea Selatan (*Alternatives*)

Berdasarkan analisis peneliti terdapat dua alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Korea Selatan di dalam menanggapi situasi yang sedang dihadapi negaranya, yaitu:

Korea Selatan juga dapat memilih opsi lain dalam hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Amerika Serikat mengenai penempatan sistem THAAD di Korea Selatan. Sejak terpilihnya Moon Jae-in sebagai presiden baru Korea Selatan pada bulan Mei 2017, terdapat perbedaan pandangan Korea Selatan dengan Amerika Serikat dalam menanggapi ancaman nuklir yang dilakukan Korea Utara. Korea Selatan menginginkan untuk di lakukannya perundingan dengan Korea Utara, namun hal tersebut berbeda dengan pandangan Amerika Serikat, perbedaan pandangan tersebut menimbulkan adanya ketegangan diantara aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pada tanggal 31 Agustus 2017, melalui akun twitternya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan "talking is not the answer!", "South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will

not work, they only understand one thing!”. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya ketidaksetujuan Amerika Serikat terhadap pilihan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.

Pada tanggal 2 Agustus 2017, Presiden Donald Trump juga mengancam akan menarik Amerika Serikat dari perjanjian perdagangan bebas dengan Korea Selatan yang telah berjalan selama lima tahun. Hal tersebut membuat Korea Selatan ragu apakah dapat melanjutkan persekutuan dengan Amerika Serikat. Selain itu, selama masa kampanyenya, Presiden Moon Jae-in memperingatkan Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa ia akan meninjau kembali persetujuan Korea Selatan dalam penyebaran sistem pertahanan rudal Amerika Serikat atau yang dikenal sebagai sistem THAAD. Sehingga dalam kebijakan keamanan dengan Amerika Serikat terdapat opsi yang dapat dipilih oleh Korea Selatan apakah ingin melanjutkan kerja sama pertahanan keamanan negaranya dengan penempatan sistem THAAD atau meninggalkan kerja sama tersebut.

Kedua, Korea Selatan dihadapkan dengan pilihan memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan ekonominya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya ketergantungan Korea Selatan terhadap pasar Tiongkok sangat mempengaruhi keadaan perekonomian Korea Selatan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai mitra dagang terbesar Korea Selatan, Tiongkok memiliki peran yang sangat penting bagi Korea Selatan. Adanya ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap Tiongkok menjadikan Korea Selatan sangat membutuhkan Tiongkok dalam kegiatan ekonominya. Selain itu, Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar dan tujuan investasi asing terbesar kedua bagi Korea Selatan.

Di samping itu, Korea Selatan memilih untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok untuk mencapai kepentingan ekonominya, Korea Selatan akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam bidang ekonomi mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang utama bagi Korea Selatan. Selain itu, besarnya investasi dan arus perdagangan diantara kedua negara, tentu sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Korea Selatan, dan sesuai dengan kebijakan luar negeri yang ingin dicapai Korea Selatan yaitu memperkuat diplomasi ekonomi baik dalam cakupan regional maupun global. Adapun kerugian yang didapatkan Korea Selatan di dalam mengambil kebijakan ini adalah permasalahan keamanan yang dipertaruhkan oleh Korea Selatan. Hal ini mengingat provokasi nuklir secara terus menerus yang dilakukan Korea Utara. Sehingga apabila Korea Selatan memilih untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, maka Korea Selatan harus menghentikan kerja sama THAAD dengan Amerika Serikat.

Konsekuensi yang di hadapkan kepada Korea Selatan (Consequences)

Berdasarkan pilihan yang dihadapkan kepada Korea Selatan tentunya terdapat konsekuensi yang dimiliki masing-masing kebijakan:

1. Konsekuensi Kebijakan Keamanan dengan Amerika Serikat

Dengan Amerika Serikat dengan adanya kerja sama THAAD, dapat memberikan keuntungan bagi Korea Selatan dalam meningkatkan kapabilitas dan keamanan negaranya dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Dengan dipilihnya kebijakan keamanan dengan Amerika Serikat tentu akan menjadikan hubungan aliansi di antara kedua negara semakin meningkat.

Namun, Korea Selatan tentu harus menerima konsekuensi negatif dengan adanya penurunan hubungan dengan Tiongkok. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Tiongkok telah melakukan penentangan terhadap adanya kerja sama THAAD yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Berdasarkan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Tiongkok, Korea Selatan membentuk kebijakan untuk memperkuat komunikasi dan meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara.

Namun dengan adanya pemboikotan yang dilakukan Tiongkok terhadap masuknya segala produk Korea Selatan, Korea Selatan harus menerima konsekuensi untuk tidak dapat mencapai kepentingan ekonominya, hal tersebut kemudian juga akan berpengaruh terhadap kepentingan nasional Korea Selatan yaitu mengenai perekonomian untuk kemakmuran bersama, karena pemboikotan yang dilakukan Tiongkok berdampak kepada berbagai sektor ekonomi Korea Selatan. Beberapa dampak tersebut yaitu, agensi hiburan Korea Selatan yang harus mengalami penurunan nilai saham, seperti SM Entertainment yang mengalami penurunan nilai saham sebesar 8,2%, YG Entertainment turun 6,9% dan JYP Entertainment sebesar 2,8%, perusahaan produksi asal Korea Selatan Chorokbaem Media juga mengalami kerugian sebesar 8% dan penurunan sebesar 14,6% juga dialami distributor film Showbox Korea Selatan.

Selain itu adanya penurunan impor konten budaya Korea Selatan Ke Tiongkok juga berdampak kepada perusahaan-perusahaan penyiaran Korea Selatan. Padahal industri hiburan Korea Selatan sangat memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran budaya Korea Selatan atau yang dikenal dengan Hallyu atau Korean Wave. Selain itu penyebaran Hallyu termasuk kedalam 100 Policy Task administrasi pemerintahan Moon Jae-in, yaitu pada tugas ke 69 mengenai menciptakan lingkungan industri budaya yang adil dan

menyebarkan Hallyu keseluruh dunia. Namun dengan adanya penolakan masuknya Hallyu ke Tiongkok telah menghambat salah satu kepentingan yang ingin dicapai Korea Selatan.

Kemudian dalam bidang pariwisata Korea Selatan harus mengalami penurunan pengunjung, di mana pada bulan Juni 2017, hanya 254.930 wisatawan Tiongkok yang mengunjungi Korea Selatan, dibanding pada tahun 2016 yang mampu mencapai 758.534 orang. Padahal Tiongkok merupakan negara penyumbang wisatawan terbanyak untuk Korea Selatan. Dalam bidang pariwisata Korea Selatan harus mengalami kerugian sebesar US\$6,3 milyar. Penurunan jumlah wisatawan Tiongkok juga memberikan dampak pada perusahaan Lotte asal Korea Selatan. Lotte Duty Free yang merupakan toko bebas bea nomor satu di Korea Selatan, telah mengalami penurunan penjualan sebesar 40%, karena berkurangnya pelanggan dari Tiongkok. Selain itu, karena adanya penutupan hampir 90% gerai Lotte yang berada di Tiongkok, menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar 300 miliar won atau sebesar US\$263,97 juta.

Dampak lain dari adanya pemboikotan yang dilakukan Tiongkok juga berpengaruh terhadap penurunan penjualan produk kosmetik asal Korea Selatan (K-Beauty). Pada tanggal 3 Maret 2017, perusahaan kosmetik Amore Pacific yang menaungi berbagai brand ternama kosmetik asal Korea Selatan seperti Laneige, Innisfree, dan

Etude House mengalami penurunan saham sebesar 11%. Kemudian, perusahaan Hyundai asal Korea Selatan mengalami penurunan saham sebesar 4,4 persen. Akibat dari adanya pemboikotan yang dilakukan Tiongkok pada Korea Selatan, tercatat pada tahun 2017 kerugian yang dialami Korea Selatan mencapai 8,5 triliun won (\$7,5 miliar). Besarnya dampak yang ditimbulkan dari adanya penentangan Tiongkok terhadap kerja sama THAAD tentu sangat mempengaruhi dan menghambat Korea Selatan dalam mencapai kepentingan ekonominya sehingga penting bagi Korea Selatan mempertimbangkan kembali kerja sama THAAD yang dijalin bersama Amerika Serikat mengingat besarnya konsekuensi yang harus diterima Korea Selatan.

2. Konsekuensi Kebijakan Ekonomi dengan Tiongkok

Dengan dipilihnya kebijakan ekonomi dengan Tiongkok sebagai salah satu upaya Korea Selatan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan memperbaiki hubungan dengan Tiongkok yang mengalami penurunan karena adanya penentangan kerja sama THAAD, akan memberikan keuntungan bagi Korea Selatan dalam memperbaiki perekonomian negaranya yang melemah karena pemboikotan yang dilakukan Tiongkok. Hal tersebut juga dapat membantu Korea Selatan dalam mewujudkan salah satu dari lima pilar dalam administrasi kenegaraan pemerintahan Moon Jae-in mengenai perekonomian untuk kemakmuran bersama, di mana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Namun, apabila kebijakan tersebut dipilih maka akan memberikan dampak terhadap aliansi keamanan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh Korea Selatan yaitu, Korea Selatan harus menghentikan kerja sama THAAD dengan Amerika Serikat yang merupakan upaya Korea Selatan dalam melindungi negaranya dari ancaman nuklir Korea Utara. Hal tersebut tentu juga akan mempengaruhi hubungan dan kebijakan keamanan Korea Selatan dengan Amerika Serikat. Dengan keterbatasan kapasitas sistem nuklir yang dimiliki Korea Selatan tentu Korea Selatan harus mampu mengatasi provokasi nuklir Korea Utara tanpa adanya bantuan Amerika Serikat, sehingga dalam hal ini Korea Selatan harus menerima konsekuensi untuk tidak dapat meningkatkan keamanan negaranya dengan penempatan sistem THAAD.

Selain itu konsekuensi lain yang harus diterima Korea Selatan adalah akan adanya hambatan dalam perundingan denuklirisasi dengan Korea Utara, mengingat Korea Selatan dan Amerika Serikat yang terus berupaya untuk menyelesaikan kasus nuklir Korea Utara. Namun dengan adanya penurunan hubungan aliansi tentu akan menghambat upaya kedua negara untuk melaksanakan perundingan sebagai upaya dalam mencapai perdamaian di semenanjung Korea.

Keputusan akhir yang di pilih oleh Korea Selatan (Choice)

Pada bagian ini aktor dalam pemilihan keputusan harus menentukan pilihan rasional yang terdiri dari pemilihan alternatif yang konsekuensinya menempati urutan tertinggi dalam fungsi hasil keputusan. Keputusan yang diambil Korea Selatan tentu berdasarkan untung rugi yang telah dipertimbangkan. Sehingga dalam pertimbangan diatas, dapat dilihat Korea Selatan dibawah pemerintahan Moon Jae-in lebih memilih kebijakan ekonomi dengan Tiongkok karena memiliki kerugian yang lebih sedikit dibandingkan dengan kebijakan keamanan dengan Amerika Serikat mengenai penempatan THAAD. Dengan dipilihnya kebijakan Ekonomi dengan Tiongkok, telah membantu Korea Selatan dalam kepentingan ekonominya meskipun harus mengorbankan kepentingan keamanannya.

Sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan hubungan, Korea Selatan dan Tiongkok mengadakan pembicaraan tingkat tinggi yang dipimpin oleh wakil direktur Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan Nam Gwan-pyo dan Asisten Menteri Luar Negeri Tiongkok Kong Xuanyou. Kedua pihak menyatakan sepakat untuk meningkatkan komunikasi strategis dan kerja sama dalam menghadapi program percepatan nuklir dan rudal Korea Utara. Selain itu, menurut pernyataan Nam dalam sebuah konferensi pers, sebagai tanda pemulihan hubungan Korea Selatan dan Tiongkok, presiden

kedua negara, Moon Jae-in dan Xi Jinping, akan mengadakan pertemuan bilateral dalam kerangka forum kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik yang diselenggarakan pada 12-14 November 2017 di Vietnam (EFE, nd).

Akhirnya, pada tanggal 31 Oktober 2017, Korea Selatan dan Tiongkok mengumumkan normalisasi hubungan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan bahwa “Both sides shared the view that the strengthening of exchange and cooperation between Korea and China serves their common interests and agreed to expeditiously bring exchange and cooperation in all areas back on a normal development track” dalam pernyataan tersebut dapat dilihat adanya gangguan dalam hubungan kedua negara karena pemasangan THAAD di Korea Selatan tidak sesuai dengan kepentingan bersama kedua negara, dan menjadikan Korea Selatan dan Tiongkok sepakat untuk mengembalikan hubungan ke jalur yang normal sesegera mungkin.

Pada tanggal 11 November 2017, Presiden Moon Jae-in mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping pada kesempatan KTT APEC yang diselenggarakan di Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, diumumkan hasil konsultasi antara Korea Selatan dan Tiongkok tentang peningkatan hubungan bilateral dan sepakat untuk mendorong pemulihan komunikasi dan kerja sama yang cepat di semua bidang. Selain itu, pada tanggal 14 Desember

2017 Presiden Moon Jae-in melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Tiongkok, dan menjanjikan adanya era baru dalam hubungan bilateral diantara kedua negara. Pada saat bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi-Jinping, Presiden Moon Jae-in menyampaikan bahwa “I believe that trust is most important not only in a relationship between persons but also between countries, I wish to solidify the foundation for a new era in the relationship between the two countries based on trust and friendship between us two leaders” yang memperlihatkan adanya keinginan yang besar dari Moon Jae-in untuk memperbaiki kembali hubungan dengan Tiongkok (Hornby, n.d).

Normalisasi kedua negara ditandai dengan disepakatinya Three No’s Policy oleh Korea Selatan. Poin-poin Three No’s terdiri atas, tidak ada pemasangan THAAD tambahan, tidak berpartisipasi dalam jaringan pertahanan misil Amerika Serikat dan tidak ada pembentukan aliansi militer trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Pada tanggal 28 November 2017, akhirnya Tiongkok kembali membuka perjalanan kelompok masyarakat Tiongkok ke Korea Selatan. Hal tersebut menjadi sebuah tanda dari normalisasi hubungan kedua negara. Berbagai kegiatan untuk memperkuat kembali hubungan kedua negara juga dipulihkan, termasuk acara pertukaran budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan lembaga swasta, sehingga mendorong pertukaran orang-ke-orang dan

kerja sama antara dua negara. Kemudian, pada tanggal 14-16 Desember 2017, Presiden Moon Jae-in melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dalam rangka peringatan 25 tahun dari hubungan diplomatik Korea Selatan Tiongkok. Selama kunjungan kenegaraan Presiden Moon Jae-in ke Tiongkok, kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk memulihkan dan memajukan komunikasi dan kerja sama dalam berbagai bidang dan sepakat untuk membangun hubungan Korea Selatan-Tiongkok menjadi kemitraan koperasi strategis yang substantif dan matang.

Menurut analisis peneliti, meskipun di dalam poin-poin Three No's hanya terdiri atas kepentingan Tiongkok, namun karena adanya kepentingan Korea Selatan terhadap hubungan ekonomi dengan Tiongkok telah menjadi faktor yang mendorong Korea Selatan dalam menyetujui Three No's Policy. Dengan dibukanya kembali izin perjalanan masyarakat Tiongkok ke Korea Selatan, telah menjadi awal yang baik dalam menjalin kembali hubungan ekonomi dengan Tiongkok, dalam hal ini dapat dilihat bahwa Tiongkok sangat memiliki peran yang penting terhadap aktivitas perekonomian Korea Selatan, hal tersebutlah yang menyebabkan Korea Selatan lebih memilih untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok sebagai upaya dalam mencapai kepentingan ekonominya.

Setelah di setujuinya Three No's Policy diantara Korea Selatan dan Tiongkok sebagai tanda dari normalisasi hubungan kedua negara,

Amerika Serikat sebagai aliansi Korea Selatan menyatakan bahwa perjanjian diantara Korea Selatan dan Tiongkok tersebut dirasa kurang memuaskan bagi negaranya. Penasihat keamanan Amerika Serikat, H. R McMaster mengkhawatirkan mengenai kemungkinan pemisahan Korea Selatan dari struktur keamanan yang dipimpin Amerika Serikat.

Dalam keputusan yang diambil Korea Selatan, terdapat resiko dalam penurunan hubungan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Namun, hal tersebut memang sudah terlihat sejak adanya perbedaan pandangan diantara kedua negara pada bulan Agustus 2017 dalam menghadapi provokasi nuklir Korea Utara. Ketegangan diantara kedua negara juga kembali terjadi pada 19 November 2019, Amerika Serikat menuntut Korea Selatan membayar lebih untuk biaya penempatan 28.500 pasukan Amerika Serikat yang ada di semenanjung Korea. Pada negosiasi pembagian beban pertahanan, Amerika Serikat meminta Korea selatan untuk membayar sebesar \$5 miliar. Permintaan Amerika Serikat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Korea Selatan karena peningkatan yang terlalu besar yaitu lima kali lipat yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Dengan adanya situasi ini dapat dilihat adanya gangguan hubungan aliansi yang dihadapi oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai konsekuensi yang harus dihadapi Korea Selatan.

Kesimpulan

Ancaman nuklir yang dilakukan secara terus menerus oleh Korea Utara telah menjadikan Korea Selatan setuju untuk melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat yang ditandai dengan persetujuan kerja sama Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) pada tanggal 7 Juli 2016. Kerja sama tersebut dilakukan oleh Korea Selatan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional negaranya. Namun, kerja sama penempatan sistem THAAD oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat mendapat penolakan oleh Tiongkok. Hal tersebut disebabkan karena menurut Tiongkok dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan akan mengancam kepentingan keamanan nasional Tiongkok dan mengganggu keseimbangan keamanan regionalnya.

Respon lain yang dilakukan oleh Tiongkok yaitu dengan memberlakukan sanksi ekonomi, Tiongkok melarang masuknya berbagai produk Korea Selatan ke negaranya. Hal tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian Korea Selatan mengingat Tiongkok merupakan pasar tersebar dan mitra dagang utama bagi Korea Selatan. Namun pada akhirnya Korea Selatan mau melaksanakan normalisasi hubungan dengan Tiongkok dengan disetujuinya Three Nos Policy. Keputusan Korea Selatan ini selaras dengan tujuan yang hendak dicapai serta kemungkinan konsekuensi dari setiap opsi yang mungkin dilakukan.

Daftar Pustaka

- A, Mintz dan Karl DeRouen Jr. 2012. "The Rational Actor Model" *Understanding Foreign Policy Decision Making*, hal.57.
- Abrahamuan, Andray, dan Daekwon Son, "Moving On: China Resolves THAAD Dispute With South Korea" diakses melalui <https://www.38north.org/2017/11/abrahamianson110917/>
- AFP, "N Korean nuclear test condemned as intolerable provocation" *Indian Express*, 6 Januari 2016, diakses melalui <https://indianexpress.com/article/world/world-news/n-korean-nuclear-test-condemned-as-intolerable-provocation/> pada 10 Maret 2020
- Berlinger, Joshua. "North Korea casts shadow as Trump and Moon meet for first time" *CNN*, 29 Juni 2017, diakses melalui <https://edition.cnn.com/2017/06/28/asia/south-korea-moon-jae-in-donald-trump-meeting/index.html> pada 10 Maret 2020
- China Daily, "THAAD may lead to \$7.5b economic loss in 2017: South Korean media" 20 September 2017, diakses melalui chinadaily.com.cn/world/2017-09/20/content_32245052.htm pada 16 Februari 2020
- Cho, Jeniffer. "Turning Out the Lights?: The Impact of THAAD on Hallyu Exports to China", *Korea Economic Institute of America 한미 경제 연구소*, diakses melalui <http://keia.org/turning-out-lights-impact-thaad-hallyu-exports-china> pada 18 Desember 2019
- Chosun, "중국이사드를두려워하는진짜이유는? (The true reason why the China is afraid of THAAD)", diakses melalui <http://pub.chosun.com/client/news/viw.asp?cate=C01&mcate=M1005&nNewsNumb=20160319738&nidx=19739> pada 10 Januari 2019
- Deede, Sara Elizabeth. 2010. "Activism and Identity: How Korea's Independence Movement Shaped the Korean Immigrant Experience in America, 1905-1945", *Dissertations and Theses, Portland State University*, hal.1.
- EFE, "Beijing, Seoul to strengthen ties despite differences over THAAD" 31 Oktober 2017, diakses melalui <https://www.efe.com/efe/english/world/china-to-oppose-thaad-despite-mending-ties-with-south-korea/50000262-3424279> pada 28 Februari 2020

- Eun, Kim Ji. 2010. *Korean Wave In China: It,s Impact On The South Korean-Chinese Relations*, Vancouver: University of British Columbia, hal 19.
- Ferrier, Kyle. “Just How Dependent is South Korea on Trade with China” Korea Economic Institue of Amerika, diakses melalui <http://keia.org/just-how-dependent-south-korea-trade-china> pada 20 Februari 2020
- Harris, Bryan, Song Jung-a, Sherry Fei Ju, dan Tom Hancock, “China bans tour groups to South Korea as defence spat worsens”, *Financial Times*, 3 Maret 2017, diakses melalui <https://www.ft.com/content/9fc4b1b4-ffb1-11e6-96f8-3700c5664d30> pada 18 Desember 2019
- Heung-kyu Kim, 2017. *China and the U.S.-ROK Alliance: Promoting a Trilateral Dialogue*, hal.1.
- Hornby, Lucy. “South Korea’s Moon Jae-in calls for ‘new era’ in China relations”, *Financial Times*, 14 Desember 201, diakses melalui <https://www.ft.com/content/d7ea5874-e0ba-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c> pada 28 Februari 2020
- Jang, Soo Hyun. 2012. “The Korean Wave and Its Implications for the Korea-China Relationship”, *Journal of International and Area Studies*, hal.98.
- Judson, Jen. “THAAD To Officially Deploy to South Korea” 7 Juli 2016, diakses melalui <http://www.defensenews.com/story/defense/2016/07/07/thaad-officially-deploy-southkorea/86837806/>; pada 10 November 2019.
- Jun, Hannah. 2017. “Hallyu at a Crossroad: The Clash of Korea’s Soft Power Succes and China’s Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System Deployment” dalam *Asian International Studies Review* Vol. 18. No. 1. Hal 163
- Kafle, Tulasi R. 2011. “Making a Difference: Allison’s Three Models of Foreign Policy Analysis”, hal.3.
- Kim, Cyntia dan Hyunjoo Jin, “With China dream shattered over missile land deal, Lotte faces costly overhaul” *Reuters*, 25 Oktober 2017, diakses melalui <https://www.reuters.com/article/us-lotte-china-analysis/with-china-dream-shattered-over-missile-land-deal-lotte-faces-costly-overhaul-idUSKBN1CT35Y> pada 18 Desember 2019.
- Kim, Inwook & Soul Park, 2018. “Deterrence under nuclear asymmetry: THAAD and the prospects for missile defense on the Korean peninsula”, dalam *Contemporary Security Policy*, hal.5.

Meick, Ethan dan Nargiza Salidjanova, 2017. "China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment and its Implications" hal.6.

Ministry of Foreign Affairs, "Diplomatic White Paper 2016"

Ministry of Foreign Affairs, "Diplomatic White Paper 2018"

Permata, I. M. (2019). Analisis Konstruktivisme: Perilaku Korea Utara terhadap Denuklirisasi. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(2), 109-110.

Sankara, Jaganath dan Bryan L. Fearey. 2017. Missile defense and strategic stability: Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) in South Korea., *Contemporary Security Policy*, hal.4.

U.S Department of State, " U.S. Relations With the Republic of Korea" 17 Juli 2018, diakses melalui state.gov/u-s-relations-with-the-republic-of-korea/ pada tanggal 27 November 2019

Yonhap News Agency, "S. Korea Selects golf course as new site for THAAD" diakses melalui <https://en.yna.co.kr/view/AEN20160930004900315> pada 12 November 2019.

Yonhap News, "Most Lotte hypermarkets in China still remain shut over THAAD backlash" diakses melalui <https://en.yna.co.kr/view/AEN20180216002000320> pada 18 Desember 2019

Acknowledgement

Recognize those who helped in the research, especially funding supporter of your research financially. Include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial supporters, or may another supporter, i.e. Proofreaders, Typists, and Suppliers, who may have given materials. Do not acknowledge one of the authors names.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

Biografi

Nadya Elvira Alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Memiliki ketertarikan terhadap isu keamanan di Asia Timur.